



EVALUASI PROGRAM BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH UNTUK MENINGKATKAN MUTU LAYANAN PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN DI KABUPATEN MERAUKE

Roberto W. Marpaung^{1*}, Fredy², Serlina Boru Sinaga³

^{1,2,3}Universitas Musamus Merauke

Email: Roberto_fkip@unmus.ac.id¹, Fredy_pgdsd@unmus.ac.id², serlinaborsin@unmus.ac.id³

Informasi Artikel	Abstract
Submitted: 06-04-2026 Revised: 16-04-2026 Published: 30-04-2026 Keywords: <i>Evaluation, School Operational Suport, Education</i>	Education is one of the main pillars of national development and plays an important role in improving the quality of human resources. The School Operational Assistance (BOS) Program, which has been implemented since 2005, aims to reduce the financial burden of education for students and improve the quality of educational services in both public and private schools. Through the allocation of BOS funds, schools are expected to enhance educational facilities and infrastructure, improve the quality of the teaching and learning process, and organize various educational activities that support the improvement of students' academic achievement. In addition, BOS is expected to reduce school dropout rates and ensure that all children have access to proper education. This can be achieved if the allocation of BOS funds is carried out according to the established plan, complies with the existing technical guidelines, and is supported by integrity and both internal and external oversight. However, the implementation of the BOS Program in various regions, particularly in Merauke Regency, South Papua Province, faces contextual challenges that are not always accommodated by central government policies. Merauke Regency has vast and diverse geographical conditions, limited educational accessibility in 3T areas (remote, underdeveloped, and frontier regions), as well as challenges related to human resources and uneven school management capacity. To improve the effectiveness of BOS fund utilization, improvement strategies are needed, such as strengthening the capacity of BOS fund managers, developing more comprehensive school needs-based planning, and conducting regular evaluations to ensure that BOS funds truly have a positive impact on students' learning outcomes. In the implementation of the BOS Program, which aims to improve the quality of education in Merauke Regency, various obstacles are frequently encountered, particularly at the elementary school level.

Abstrak

Pendidikan merupakan salah satu pilar utama pembangunan nasional dan memainkan peran penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS), yang telah dilaksanakan sejak tahun 2005, bertujuan untuk mengurangi beban keuangan pendidikan bagi siswa dan meningkatkan kualitas layanan pendidikan di sekolah negeri maupun swasta. Melalui alokasi dana BOS, sekolah diharapkan dapat meningkatkan fasilitas dan infrastruktur pendidikan, meningkatkan kualitas proses pengajaran dan pembelajaran, serta menyelenggarakan berbagai kegiatan pendidikan yang mendukung peningkatan prestasi akademik siswa. Selain itu, BOS diharapkan dapat mengurangi angka putus sekolah dan memastikan bahwa semua anak memiliki akses terhadap pendidikan yang layak. Hal ini dapat dicapai jika alokasi dana BOS dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, mematuhi pedoman teknis yang ada, dan didukung oleh integritas serta pengawasan internal dan eksternal. Namun, pelaksanaan Program BOS di berbagai daerah, khususnya di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, menghadapi tantangan kontekstual yang tidak selalu diakomodasi oleh kebijakan pemerintah pusat. Kabupaten Merauke memiliki kondisi geografis yang luas dan beragam, akses pendidikan yang terbatas di daerah 3T (daerah terpencil, terbelakang, dan perbatasan), serta tantangan terkait sumber daya manusia dan kapasitas manajemen sekolah yang tidak merata. Untuk meningkatkan efektivitas pemanfaatan dana

BOS, diperlukan strategi perbaikan, seperti penguatan kapasitas pengelola dana BOS, pengembangan perencanaan berbasis kebutuhan sekolah yang lebih komprehensif, dan pelaksanaan evaluasi berkala untuk memastikan bahwa dana BOS benar-benar memberikan dampak positif pada hasil belajar siswa. Dalam pelaksanaan Program BOS, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Merauke, berbagai kendala seringkali ditemui, terutama di tingkat sekolah dasar.

Kata Kunci: Evaluasi, Program Bantuan Operasional Sekolah, Evaluasi.

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan nasional yang berperan penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pendidikan dasar sembilan tahun, yang meliputi jenjang Sekolah Dasar merupakan fondasi bagi pengembangan potensi individu dan pencapaian pendidikan yang lebih tinggi. Dalam konteks ini, pemerintah Indonesia telah meluncurkan berbagai program untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan, salah satunya adalah Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (Kemdikbudristek, 2023, p. 2).

Program BOS, yang mulai dilaksanakan sejak tahun 2005, bertujuan untuk meringankan beban biaya pendidikan bagi peserta didik dan meningkatkan kualitas layanan pendidikan di sekolah-sekolah negeri maupun swasta. Melalui alokasi dana BOS, diharapkan sekolah dapat meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan, memperbaiki kualitas proses pembelajaran, serta mengadakan berbagai kegiatan pendidikan yang mendukung peningkatan prestasi peserta didik. Selain itu, BOS diharapkan dapat mengurangi angka putus sekolah dan memastikan semua anak mendapatkan akses pendidikan yang layak (Doringin et al., 2023, p. 338).

Efektivitas Program BOS berhubungan langsung dengan peningkatan mutu layanan pendidikan dasar melalui peningkatan aksesibilitas, ketersediaan sarana dan prasarana, kualitas proses pembelajaran, dukungan terhadap kegiatan ekstrakurikuler, pengurangan angka putus sekolah, peningkatan hasil belajar peserta didik, penguatan manajemen sekolah, dan kepuasan stakeholder (Dewi et al., 2015, p. 4).

Namun, pelaksanaan Program BOS di berbagai daerah, khususnya kabupaten Merauke, Propinsi Papua Selatan, menghadapi tantangan kontekstual yang tidak selalu terakomodasi oleh kebijakan pusat. Kabupaten Merauke memiliki kondisi geografis yang luas dan beragam, aksesibilitas pendidikan yang masih terbatas di daerah 3T (terpencil, tertinggal dan terluar), serta tantangan sumber daya manusia dan manajemen sekolah yang belum merata. Di sisi lain, program pendidikan dasar 9 tahun sebagai amanat nasional membutuhkan sinergi antara kebijakan pendanaan dan peningkatan kualitas layanan pendidikan.

Angka melek huruf umur 15-59 tahun di kabupaten Merauke tahun 2023 berdasarkan laporan BPS adalah sebesar 81,53, masih berada jauh di bawah rata-rata nasional sebesar 98,49. Ini berarti masih ada sekitar 17,22% penduduk kabupaten Merauke berusia di atas 15 tahun yang belum memiliki kemampuan membaca dan menulis kalimat sederhana (BPS, 2023). Kemudian Kemdikbud mencatat hasil asesmen kompetensi minimal (AKM) di kabupaten Merauke masih di bawah 50% (Kemdikbud,

2023). Ini menunjukkan kompetensi literasi calistung peserta didik masih rendah. Program dana BOS memiliki potensi besar untuk meningkatkan kompetensi calistung peserta didik jika digunakan dengan tepat. Alokasi yang efektif, fokus pada pelatihan guru, penyediaan sarana belajar yang memadai, program khusus, dan pengawasan yang baik merupakan kunci untuk memastikan dana tersebut dapat berkontribusi secara maksimal terhadap peningkatan kompetensi calistung.

Hasil observasi pada sekolah khusus daerah 3T menunjukkan fasilitas yang minim dan sering tidak memadai, ditambah dengan kurangnya akses ke materi pembelajaran berkualitas dan teknologi informasi yang mendukung proses belajar mengajar. Akibatnya, banyak anak-anak tidak menyelesaikan pendidikan dasar dengan keterampilan dasar membaca, menulis, dan berhitung yang memadai. Selain itu, kekurangan tenaga pengajar berkualitas menjadi kendala serius karena banyak guru enggan ditempatkan di daerah terpencil, menyebabkan ketidakseimbangan antara jumlah guru dan peserta didik serta menurunnya kualitas pengajaran. Kondisi ini menggambarkan pengelolaan BOS yang belum maksimal dalam meningkatkan mutu layanan Pendidikan dasar di Kabupaten Merauke. Oleh karena itu, penelitian mengenai efektivitas Program BOS dalam meningkatkan mutu layanan pendidikan dasar 9 tahun di Kabupaten Merauke menjadi sangat penting dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas Program BOS di Kabupaten Merauke. Dengan demikian, program ini diharapkan dapat lebih optimal dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan, khususnya di daerah-daerah dengan tantangan khusus seperti Kabupaten Merauke.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian evaluasi yaitu proses sistematis untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi guna menentukan nilai dan efektivitas program, intervensi, atau kebijakan (Dewi et al., 2015, p. 4). Pemilihan pendekatan evaluasi ini bertujuan untuk dapat mengetahui keberhasilan suatu program yang sedang berjalan, yang mana hasilnya dapat diperlukan untuk membuat berbagai putusan dalam kebijakan pendidikan (Qodir, 2017, p. 1). Dalam penelitian ini, kebijakan pendidikan yang dimaksud yaitu bagaimana kebijakan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dapat meningkatkan mutu layanan pendidikan sekolah dasar.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Profil Sekolah di Kabupaten Merauke

Kabupaten Merauke, yang terletak di provinsi Papua Selatan, memiliki Sekolah Dasar (SD) yang beragam dalam hal fasilitas dan kualitas pendidikan. Berikut data sekolah, peserta didik dan guru yang terdapat di SD kabupaten Merauke.

Tabel 1. Data Sekolah, Peserta Didik dan Guru

No	Wilayah	Sekolah	Peserta Didik	Guru
1	Merauke	37	11.218	551
2	Tanah Miring	17	2.300	166
3	Kurik	12	1.542	108
4	Ulilin	17	1.908	105
5	Semangga	11	2.075	133
6	Jagebob	12	1.239	94
7	Malind	7	1.372	62
8	Eligobel	12	1.193	57
9	Muting	12	843	55
10	Okaba	11	887	74
11	Kimaam	7	1.191	55
12	Sota	5	811	39
13	Ngguti	7	751	36
14	Naukenjerai	5	483	34
15	Tabonji	6	666	42
16	Tubang	6	719	38
17	Waan	5	631	33
18	Animha	5	546	22
19	Ilwayab	4	355	22
20	Kaptel	5	434	26
21	Kontuar	4	377	13
22	Padua	2	350	11
Total		209	31.891	1.776

(Sumber: diolah dari data dapodik, semester ganjil 2024/2025)

Berdasarkan data yang diperoleh, terdapat 209 SD yang tersebar di 22 distrik. Wilayah dengan jumlah sekolah, peserta didik, dan tenaga pengajar terbanyak adalah distrik Merauke, sementara wilayah dengan jumlah sekolah dan peserta didik paling sedikit adalah distrik Padua. Jumlah peserta didik di SD sebanyak 31.891 orang. Sementara itu, tenaga guru di Kabupaten Merauke berjumlah 1.776. Jika dianalisis lebih lanjut, rasio guru terhadap peserta didik di SD adalah 1:18, yang masih dalam batas ideal untuk pendidikan dasar.

Selain itu, data sarana dan prasarana pendidikan menunjukkan bahwa meskipun jumlah ruang kelas di SD mencapai 1.462 terdapat ketimpangan dalam fasilitas pendukung seperti perpustakaan dan laboratorium. Hanya terdapat 108 perpustakaan di SD, yang berarti masih banyak sekolah yang belum memiliki akses terhadap sumber belajar yang memadai. Begitu pula dengan jumlah laboratorium yang hanya tersedia di 23 SD, menunjukkan perlunya peningkatan sarana pembelajaran berbasis praktik, terutama di tingkat sekolah dasar. Berikut data sarpras di SD kabupaten Merauke.

Tabel 2. Data Sarana dan Prasarana di SD

No	Fasilitas	SD		
		Negeri	Swasta	Jumlah
1	Kelas	764	698	1.462
2	Perpustakaan	61	47	108
3	Laboratorium	10	13	23
4	Praktik	0	0	0
5	Pimpinan	32	34	66
6	Guru	73	72	145
7	Ibadah	6	7	13
8	UKS	19	17	36
9	Toilet	368	276	644
10	Gudang	52	24	76
11	Sirkulasi	0	0	0
12	Olahraga	1	5	6
13	TU	7	9	16
14	Konseling	2	4	6
15	Osis	0	0	0

(Sumber: diolah dari data dapodik, semester ganjil 2024/2025)

Beberapa fasilitas lainnya juga masih kurang, seperti ruang praktik yang tidak tersedia sama sekali baik di SD. Toilet di SD berjumlah 644 yang masih perlu ditingkatkan untuk mendukung kebersihan dan kesehatan peserta didik. Ketidakseimbangan fasilitas ini menunjukkan perlunya perhatian lebih dalam pembangunan infrastruktur pendidikan agar seluruh sekolah dapat memberikan layanan pendidikan yang lebih baik dan merata. Diperlukan upaya lebih lanjut dari berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas pendidikan di kabupaten Merauke, baik melalui pengadaan dan perbaikan fasilitas yang lebih memadai maupun peningkatan kompetensi tenaga pendidik. Sebagai salah satu sumber pendanaan utama dalam dunia pendidikan, Bantuan Operasional Sekolah (BOS) memiliki peran strategis dalam meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Merauke.

Dana BOS dapat dialokasikan untuk berbagai aspek penting yang mendukung peningkatan mutu pendidikan, seperti perbaikan ruang kelas dengan kondisi ringan, sehingga kondisi belajar dapat lebih nyaman, pelatihan dan peningkatan kompetensi guru, sehingga mereka dapat memberikan metode pembelajaran yang lebih inovatif dan efektif, mendukung insentif bagi guru, terutama bagi mereka yang bertugas di daerah terpencil, agar tetap termotivasi dalam mengajar, pengembangan program pembelajaran seperti penyediaan buku pelajaran dan bahan ajar lainnya guna meningkatkan kualitas pembelajaran dan pengembangan program ekstrakurikuler untuk meningkatkan keterampilan dan bakat peserta didik di berbagai bidang.

2. Deskripsi Hasil Penelitian

a. Proses

1) Besaran Dana BOS Tahun 2024

Penerimaan dana BOS merupakan salah satu langkah strategis pemerintah dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Pada tahun 2024, khususnya untuk SD di Kabupaten Merauke, penerimaan dana BOS menjadi sangat penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan fasilitas yang ada di sekolah. SD sebagai penerima dana BOS ini, mengalami proses penerimaan yang terstruktur dan terencana dengan baik. Berikut tabel 3 tentang besaran dana BOS tahun 2024 yang diterima oleh SD di kabupaten Merauke.

Tabel 3. Besaran Dana BOS Tahun 2024

No	Sekolah	Jumlah yang diterima	%	Realisasi	%
Tahap Pertama. 50% (Januari-Juni 2024)					
1	SD Swasta	10.005.690.000	32,57	9.463.392.000	30,80
2	SD Negeri	10.154.730.000	33,05	10.229.810.460	33,30
Tahap Kedua. 50% (Juli-Desember 2024)					
1	SD Swasta	9.736.100.100	32,13	8.338.069.600	27,51
2	SD Negeri	10.016.253.100	33,05	10.194.221.100	33,64

(Sumber: olah data primer, 2024)

Laporan realisasi penggunaan Dana BOS tahun sebelumnya (tahun 2023) digunakan sebagai dasar penyaluran tahap 1 tahun 2024. Laporan realisasi keseluruhan tahun 2023 dan laporan realisasi minimal 50% dari dana yang diterima pada tahap I tahun 2024 menjadi dasar penyaluran tahap 2 tahun 2024.

Dalam tahap 1 penerimaan dana BOS, paling lambat 25 Juni 2024, sekolah diharapkan sudah dapat memanfaatkan dana tersebut untuk berbagai kegiatan operasional. Misalnya, dana ini dapat digunakan untuk pembelian alat tulis, buku pelajaran, dan perlengkapan belajar mengajar lainnya. Dengan adanya dana ini, sekolah dapat merealisasikan anggaran sesuai dengan RKAS yang telah disusun.

Pada tahun 2024, pemerintah menyalurkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam dua tahap, yaitu tahap pertama pada periode Januari–Juni dan tahap kedua pada periode Juli–Desember. Dana ini dialokasikan kepada berbagai jenjang sekolah, baik negeri maupun swasta, guna mendukung operasional pendidikan. Pada tahap kedua, jumlah dana yang diterima sedikit berkurang dibandingkan tahap pertama, yaitu Rp. 30.304.618.000. Hal ini karena pada tahap kedua terdapat sekolah yang terlambat

melaporkan secara online LPJ tahap pertama dan belum melakukan sinkronisasi ARKAS tahun 2024, sehingga mendapat penalti penundaan pembayaran tahap kedua. Sekolah tersebut adalah SD YPPK Onggaya, SD YPPK Zenegi, SD YPK Pachas, SD YPK Wan, SD YPPK Mandum, SD YPPK Galum, SD YPK Tagaepe, SD YPPK Yomop dan SD YPPK Bibikem.

Jika dibandingkan antara kedua tahap, terlihat bahwa pada tahap kedua terdapat penurunan tingkat realisasi dana, dari 98,47% pada tahap pertama menjadi 94,96%. Hal ini mengindikasikan adanya dana yang belum sepenuhnya terserap, khususnya pada SD Swasta mengalami penurunan signifikan dalam pengeluaran dibandingkan tahap sebelumnya. Hal ini dikarenakan laporan dapodik yang terlambat hingga batas *cut off* per tanggal 31 Agustus tahun sebelumnya dan hukuman pinalti telat LPJ tahap 1.

Secara keseluruhan, tingkat penyerapan dana BOS pada tahun 2024 cukup optimal, dengan rata-rata di atas 95% setiap tahap. Namun, perbedaan dalam tingkat realisasi antar sekolah menunjukkan perlunya evaluasi lebih lanjut, terutama untuk sekolah-sekolah yang pelaporannya terlambat. Peningkatan pengawasan serta perencanaan anggaran yang lebih baik diharapkan dapat meningkatkan efisiensi penggunaan dana BOS pada periode mendatang.

Tabel 4. Besaran Belanja BOS Tahun 2024

Sekolah	Belanja Pegawai	Belanja Barang Jasa	Belanja Modal	Total Belanja
Tahap Pertama. 50% (Januari-Juni 2024)				
SD Swasta	2.694.713.000	5.592.806.332	1.175.872.668	936.159.845
SD Negeri	2.611.146.000	6.029.384.480	1.589.279.980	1.561.402.590
Tahap Kedua. 50% (Juli-Desember 2024)				
SD Swasta	2.423.470.000	4.978.439.755	936.159.845	8.338.069.600
SD Negeri	2.167.365.000	6.465.453.510	1.561.402.590	10.194.221.100

(Sumber: olah data primer, 2024)

Dana BOS dialokasikan ke berbagai jenis belanja, yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal. Data ini memberikan gambaran bagaimana SD menggunakan dana BOS untuk mendukung kegiatan operasional dan pengembangan sarana pendidikan.

Dari tabel 4 dapat disimpulkan bahwa belanja barang dan jasa menjadi komponen terbesar dalam penggunaan dana BOS, mencapai 58,73% dari total belanja dan meningkat menjadi 62,58% pada tahap kedua. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar dana digunakan untuk operasional sekolah, seperti pengadaan alat tulis, perawatan dan perbaikan ringan fasilitas, serta kebutuhan lainnya yang menunjang proses pembelajaran.

Sementara itu, belanja pegawai mengambil porsi terbesar kedua dengan alokasi 26,47%, yang mencerminkan pentingnya pembayaran honorarium bagi tenaga guru honorer sekolah dan staf. Belanja modal, yang digunakan untuk pengadaan aset tetap dan pengembangan infrastruktur sekolah, memiliki porsi paling kecil, yaitu 14,77%, menunjukkan bahwa investasi dalam bentuk fisik masih terbatas pada tahap ini. Peningkatan investasi dalam bentuk belanja modal direkomendasikan, agar sekolah dapat meningkatkan kualitas sarana dan prasarana secara jangka panjang.

b. Pembukuan Dana BOS

Pembukuan dana BOS adalah proses pencatatan keuangan yang dilakukan oleh sekolah untuk memastikan penggunaan dana BOS sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pembukuan ini mencakup penerimaan, belanja, serta pelaporan dana BOS agar transparan dan akuntabel. Setiap SD yang menerima dana BOS telah membuat pembukuan penggunaan dana dengan jelas dan terperinci. Pembukuan yang dibuat diantaranya buku kas umum (BKU), buku pembantu kas, buku pembantu bank, buku pembantu pajak dan buku pembantu keuangan lainnya. Semua transaksi keuangan, baik penerimaan maupun pengeluaran dana BOS dicatat dan memiliki bukti pendukung seperti kwitansi atau faktur yang disahkan oleh Kepala Sekolah dan Bendahara. Selain itu juga, sekolah sudah mencatat kewajiban pajak yang harus dibayarkan terkait dengan penggunaan dana BOS, seperti PPN dan PPh. Bukti pengeluaran dana BOS telah diarsipkan dengan baik, dilampirkan dalam laporan, dan disusun berdasarkan tanggal atau bulan. Peran Kepala Sekolah dan Guru dalam Pengelolaan Dana BOS. Kepala sekolah memiliki tanggung jawab utama dalam pengelolaan Dana BOS, termasuk menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), melakukan pengawasan penggunaan anggaran, serta memastikan transparansi dan akuntabilitas melalui pelaporan yang tepat waktu.

Kepala sekolah di kabupaten Merauke memainkan peran strategis sebagai pemimpin yang harus mampu menyeimbangkan kebutuhan pembelajaran dengan realitas keterbatasan yang ada. Beberapa kepala sekolah telah menginisiasi program berbasis lokal, seperti pengadaan bahan ajar kontekstual yang menggali budaya Marind atau pemanfaatan ruang belajar terbuka di lingkungan sekolah. Guru berperan aktif dalam proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai Dana BOS. Guru memberikan masukan terhadap kebutuhan pembelajaran, terlibat dalam penyusunan program sekolah, dan menjadi pelaksana langsung dari berbagai kegiatan seperti kelas tambahan, bimbingan remedial, dan pengembangan media pembelajaran sederhana. Di beberapa sekolah, guru juga didorong untuk menyusun dan mereproduksi bahan ajar yang relevan dengan kondisi sosial dan budaya lokal, dengan dukungan pendanaan dari BOS. Meskipun peran kepala sekolah dan guru cukup optimal, masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu mendapat perhatian diantaranya:

- a) Keterbatasan pelatihan pengelolaan keuangan BOS, terutama bagi sekolah-sekolah di kampung pedalaman yang tidak selalu mendapat pendampingan teknis dari dinas pendidikan.

- b) Minimnya tenaga administrasi, membuat beban pengelolaan dan pelaporan BOS bertumpu pada kepala sekolah dan guru.
- c) Keterlambatan pencairan dana, yang berdampak pada tertundanya pelaksanaan program pendidikan.

Berdasarkan hasil analisis di atas ditemukan beberapa permasalahan dalam penyaluran Dana BOS, antara lain:

- a) Terlambatnya pelaporan LPJ oleh beberapa sekolah menyebabkan penalti penundaan pencairan dana BOS tahap berikutnya.
- b) Sinkronisasi ARKAS yang tidak tepat waktu.
- c) Ketidaksesuaian penggunaan dana dengan rencana dan kebutuhan nyata sekolah.
- d) Ketimpangan dalam kapasitas pengelolaan BOS antar sekolah, terutama di daerah 3T.

Rekomendasi yang dapat diberikan untuk mengatasi masalah-masalah dalam penyaluran Dana BOS berdasarkan temuan di atas adalah sebagai berikut:

- a) Meningkatkan kapasitas SDM pengelola dana BOS melalui pelatihan berkala untuk kepala sekolah, bendahara, dan operator sekolah tentang teknis pelaporan, sinkronisasi ARKAS, dan pengelolaan anggaran berbasis kebutuhan riil sekolah. Selain itu perlu dibuat sistem pendampingan berjenjang, misalnya melibatkan pengawas atau tim BOS kabupaten sebagai mentor sekolah-sekolah yang memiliki riwayat keterlambatan pelaporan.
- b) Dinas Pendidikan perlu mengembangkan sistem monitoring *real-time*, misalnya dashboard pelaporan berbasis data Dapodik/ARKAS yang mengingatkan sekolah akan batas waktu pelaporan. Selain itu perlu juga melakukan kunjungan lapangan berkala terutama ke sekolah-sekolah yang berada di daerah 3T dan memiliki kendala jaringan internet untuk pelaporan.
- c) Dinas Pendidikan menyediakan alat bantu pelaporan *offline* atau sistem semi-digital yang bisa disinkronisasi saat jaringan tersedia bagi sekolah yang berada di wilayah blank spot
- d) Melibatkan pemerintah distrik dan kepala kampung dalam proses pengawasan dan penegakan kepatuhan pelaporan BOS.

Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Kabupaten Merauke secara administratif telah berjalan cukup baik, ditunjukkan oleh tingginya tingkat realisasi anggaran, tersusunnya pembukuan keuangan, serta pelaksanaan pengelolaan dana yang mengacu pada Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS). Namun demikian, tingginya tingkat penyerapan anggaran belum sepenuhnya diikuti oleh peningkatan mutu layanan pendidikan yang optimal. Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan suatu program tidak cukup diukur dari aspek penyerapan anggaran, tetapi harus dilihat dari dampaknya terhadap peningkatan kualitas pembelajaran dan hasil belajar peserta didik, sebagaimana dijelaskan dalam

model evaluasi CIPP yang menekankan pentingnya evaluasi konteks, input, proses, dan produk (Stufflebeam & Zhang, 2017).

Kondisi tersebut terlihat dari masih adanya ketimpangan sarana dan prasarana pendidikan, terutama keterbatasan perpustakaan, laboratorium, ruang UKS, dan fasilitas pembelajaran lainnya yang masih belum merata di berbagai sekolah dasar di Kabupaten Merauke. Menurut Hanushek dan Woessmann (2020), investasi pada infrastruktur pendidikan hanya akan memberikan dampak signifikan apabila diikuti oleh peningkatan kualitas guru, kepemimpinan sekolah, serta efektivitas proses pembelajaran. Selain itu, karakteristik geografis Kabupaten Merauke sebagai wilayah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal) menjadi faktor yang memengaruhi efektivitas implementasi Program BOS, khususnya dalam pelaporan keuangan, sinkronisasi ARKAS, distribusi sarana pendidikan, dan pemerataan akses layanan pendidikan. UNESCO (2023) menegaskan bahwa wilayah terpencil memerlukan kebijakan afirmatif yang disesuaikan dengan kondisi geografis dan sosial budaya masyarakat agar kesenjangan mutu pendidikan dapat diminimalkan. Dari sisi tata kelola, hasil penelitian menunjukkan bahwa kepala sekolah memiliki peran strategis sebagai pemimpin pembelajaran (instructional leader) yang menentukan arah penggunaan dana BOS sesuai dengan kebutuhan sekolah.

Hallinger (2020) menjelaskan bahwa kepemimpinan kepala sekolah merupakan salah satu faktor yang paling berpengaruh terhadap peningkatan mutu sekolah melalui pengelolaan sumber daya secara efektif dan penciptaan budaya organisasi yang mendukung pembelajaran. Guru juga memiliki kontribusi penting dalam penyusunan program sekolah, pengembangan bahan ajar, serta pelaksanaan berbagai kegiatan pembelajaran yang didanai melalui BOS. Darling-Hammond et al. (2020) menjelaskan bahwa investasi terhadap peningkatan kompetensi guru merupakan strategi yang paling efektif dalam meningkatkan kualitas pembelajaran dibandingkan hanya berfokus pada penyediaan fasilitas fisik. Di sisi lain, masih ditemukannya keterlambatan pelaporan pertanggungjawaban dana BOS dan rendahnya kapasitas pengelola BOS di beberapa sekolah menunjukkan bahwa penguatan sumber daya manusia masih menjadi kebutuhan utama.

Fullan (2020) menegaskan bahwa reformasi pendidikan hanya akan berhasil apabila disertai dengan peningkatan kapasitas individu dan organisasi yang menjalankan kebijakan tersebut. Temuan penelitian ini juga memperlihatkan bahwa implementasi Program BOS merupakan bagian dari penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), di mana sekolah diberikan otonomi dalam mengelola sumber daya sesuai kebutuhan lokal. Menurut Caldwell (2016), otonomi sekolah akan menghasilkan peningkatan mutu apabila diikuti oleh sistem akuntabilitas yang kuat, transparansi pengelolaan keuangan, serta partisipasi seluruh pemangku kepentingan. Hal tersebut sejalan dengan pandangan Mulyasa (2022) bahwa transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan partisipasi merupakan prinsip utama dalam tata kelola pendidikan yang baik (good school governance). Selain itu, OECD (2023) menyatakan bahwa keberhasilan kebijakan desentralisasi pendidikan sangat dipengaruhi oleh kapasitas kelembagaan sekolah, kompetensi kepala sekolah, dan sistem monitoring yang berkelanjutan. Oleh karena itu,

evaluasi Program BOS tidak seharusnya berhenti pada aspek kepatuhan administratif, tetapi juga perlu diarahkan pada pengukuran dampak terhadap peningkatan mutu layanan pendidikan, kualitas pembelajaran, pemerataan akses pendidikan, dan capaian hasil belajar peserta didik.

Pandangan tersebut juga didukung oleh World Bank (2018) yang menegaskan bahwa peningkatan pembiayaan pendidikan hanya akan menghasilkan perbaikan kualitas apabila disertai dengan tata kelola yang efektif, penggunaan anggaran yang berbasis kebutuhan sekolah, serta evaluasi berkelanjutan terhadap outcome pembelajaran. Dengan demikian, hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa Program BOS di Kabupaten Merauke telah memberikan kontribusi positif terhadap keberlangsungan operasional sekolah, namun efektivitasnya dalam meningkatkan mutu layanan pendidikan masih memerlukan penguatan pada aspek kapasitas sumber daya manusia, pemerataan infrastruktur pendidikan, sistem pengawasan, monitoring berbasis data, serta pengembangan kebijakan afirmatif yang lebih responsif terhadap karakteristik wilayah 3T sehingga tujuan pemerataan mutu pendidikan dasar dapat tercapai secara berkelanjutan.

KESIMPULAN

Dampak nyata dana BOS terhadap kualitas pendidikan di Indonesia belum maksimal. Meskipun dana BOS telah disalurkan ke berbagai sekolah, kualitas pendidikan yang dihasilkan masih jauh dari harapan. Banyak sekolah yang masih kesulitan dalam menyediakan fasilitas yang memadai untuk mendukung proses belajar mengajar. Misalnya, beberapa sekolah di daerah 3T masih kekurangan ruang kelas yang layak, buku pelajaran, dan alat peraga pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun dana BOS telah ada, masih terdapat tantangan besar dalam implementasinya. Selain itu, kualitas pengajaran juga tidak selalu sejalan dengan alokasi dana yang diterima.

Untuk meningkatkan efektivitas penggunaan dana BOS, diperlukan strategi perbaikan seperti peningkatan kapasitas pengelola BOS, perencanaan yang lebih matang berbasis kebutuhan sekolah, serta evaluasi berkala guna memastikan bahwa dana BOS benar-benar memberikan dampak positif terhadap hasil pembelajaran peserta didik. Dalam pelaksanaan program BOS, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di kabupaten Merauke, terdapat berbagai kendala yang sering dihadapi, terutama di tingkat SD. Kendala-kendala ini tidak hanya mempengaruhi efektivitas penggunaan dana, tetapi juga berdampak pada kualitas pendidikan yang diterima oleh peserta didik. Untuk memahami lebih dalam, beberapa aspek penting yang menjadi tantangan dalam pelaksanaan dana BOS.

Rekomendasi yang dapat diberikan untuk mengatasi masalah-masalah dalam penyaluran Dana BOS berdasarkan temuan di atas adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kapasitas SDM pengelola dana BOS melalui pelatihan berkala untuk kepala sekolah, bendahara, dan operator sekolah tentang teknis pelaporan, sinkronisasi ARKAS, dan pengelolaan anggaran berbasis kebutuhan riil sekolah. Selain itu perlu dibuat sistem pendampingan berjenjang, misalnya melibatkan

pengawas atau tim BOS kabupaten sebagai mentor sekolah-sekolah yang memiliki riwayat keterlambatan pelaporan.

- b. Dinas Pendidikan perlu mengembangkan sistem monitoring *real-time*, misalnya dashboard pelaporan berbasis data Dapodik/ARKAS yang mengingatkan sekolah akan batas waktu pelaporan. Selain itu perlu juga melakukan kunjungan lapangan berkala terutama ke sekolah-sekolah yang berada di daerah 3T dan memiliki kendala jaringan internet untuk pelaporan.
- c. Dinas Pendidikan menyediakan alat bantu pelaporan *offline* atau sistem semi-digital yang bisa disinkronisasi saat jaringan tersedia bagi sekolah yang berada di wilayah blank spot
- d. Melibatkan pemerintah distrik dan kepala kampung dalam proses pengawasan dan penegakan kepatuhan pelaporan BOS. .

REFERENCES

- Caldwell, B. J. (2016). *The autonomy premium: Autonomy in education*. Australian Council for Educational Research.
- Darling-Hammond, L., Flook, L., Cook-Harvey, C. M., Barron, B., & Osher, D. (2020). Implications for educational practice of the science of learning and development. *Applied Developmental Science*, 24(2), 97–140. <https://doi.org/10.1080/10888691.2018.1537791>
- Dewi, A. dkk. (2015). Penerapan Metode Bermain Berbantuan Media Flashcard Untuk Meningkatkan Kemampuan Berhitung Permulaan Pada Anak. 3 (1). FIP. Universitas Pendidikan Ganesha.
- Doringin, F., Umami, N. Z., Sasia, K., & Pangalila, T. (2023). Towards the model of learning management system for elementary and secondary education. *Technium Social Sciences Journal*, 49, 337–349. <https://doi.org/10.47577/tssj.v49i1.9796>
- Doringin, F., Umami, N. Z., Sasia, K., & Pangalila, T. (2023). Towards the Model of Learning
- Fullan, M. (2020). *Leading in a culture of change* (2nd ed.). Jossey-Bass.
- Hallinger, P. (2020). Leadership and school improvement: Supporting educational change. *Educational Management Administration & Leadership*, 48(4), 659–663. <https://doi.org/10.1177/1741143220933901>
- Hanushek, E. A., & Woessmann, L. (2020). *The knowledge capital of nations: Education and the economics of growth*. MIT Press.
- Kemendikbudristek. (2023). *Judul Buku Panduan atau Dokumen*. Jakarta: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2024). *Petunjuk teknis pengelolaan dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Tahun 2024*. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- Leithwood, K., Harris, A., & Hopkins, D. (2020). Seven strong claims about successful school leadership revisited. *School Leadership & Management*, 40(1), 5–22. <https://doi.org/10.1080/13632434.2019.1596077>

Management System for Elementary and Secondary Education. Technium Social

Mulyasa, E. (2022). *Manajemen berbasis sekolah: Konsep, strategi, dan implementasi* (Rev. ed.). PT Remaja Rosdakarya.

Organisation for Economic Co-operation and Development. (2023). *Education policy outlook 2023: Shaping responsive and resilient education systems*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/75e40a16-en>

Qodir, Abdul. 2017. *Evaluasi dan Penilaian Pembelajaran*. Yogyakarta: K-Media

Stufflebeam, D. L., & Zhang, G. (2017). *The CIPP evaluation model: How to evaluate for improvement and accountability*. Guilford Press.

UNESCO. (2023). *Global education monitoring report 2023: Technology in education—A tool on whose terms?* UNESCO Publishing. <https://unesdoc.unesco.org/>

World Bank. (2018). *World development report 2018: Learning to realize education's promise*. World Bank. <https://doi.org/10.1596/978-1-4648-1096-1>